Journal of Sharia Economics
Vol. 8, No. 1, Agustus, 2026, pp. 128 –151
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

# Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kepuasan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau

**Yoga Apinda[1], Novi Mubyarto[2], Jevi Saputra[3]**
**[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi**

*Corresponding author, email; yogaaapinda.01@gmail.com ; novimubyarto@uinjambi.ac.id ; jevisaputra@uinjambi.ac.id

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received Juni 2025
Revised Juni 2025
Accepted Juni 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

**Keywords:**
*Transparency, Accountability, Direct Cash Assistance (BLT) Budget Management, Community Satisfaction.*

**Turabian style in citing this article: [citation Heading]**
**Yoga Apinda[1], Novi Mubyarto[2], Jevi Saputra[3] Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kepuasan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau**
*Journal of Sharia Economics 8*, No. 1 Agustus: 2026

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of transparency and accountability in the management of the Direct Cash Assistance (BLT) budget on the satisfaction of low-income communities in Kemuning District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Transparency and accountability are fundamental principles of public financial governance that are expected to enhance public trust and satisfaction with the implementation of government assistance programs.This research employed a quantitative method with a descriptive approach. The population consisted of low-income residents who were recipients of the Direct Cash Assistance (BLT) program in Kemuning District. The sampling technique used was purposive sampling. Data were collected through questionnaires distributed to the respondents. Data analysis was conducted using validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, partial significance test (t-test), simultaneous significance test (F-test), and the coefficient of determination ($R^2$) with the assistance of SPSS software. The results indicate that, partially, transparency has a positive and significant effect on the satisfaction of low-income communities. Accountability also has a positive and significant effect on community satisfaction. Simultaneously, transparency and accountability have a positive and significant influence on the satisfaction of low-income communities in Kemuning District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. These findings suggest that higher levels of transparency and accountability in the management of the BLT budget lead to greater satisfaction among the beneficiaries of the program.*

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

## A. Pendahaluan

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus diperluas sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Pada tahun 2025, pemerintah

menyalurkan BLT tambahan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp900.000 per keluarga untuk periode Oktober–Desember, yang ditujukan bagi masyarakat desil 1 sampai 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Secara makro, BLT berfungsi tidak hanya sebagai bantuan langsung bagi rumah tangga miskin dan rentan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi. Program ini diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mendekati 5,7% pada kuartal IV tahun 2025. Namun, luasnya cakupan dan banyaknya penerima menimbulkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengelolaan yang tepat sangat diperlukan agar bantuan tepat sasaran serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.Di tingkat daerah, seperti di Kecamatan Kemuning, BLT yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) diberikan langsung kepada masyarakat kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi dampak kesulitan ekonomi. Penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti belum menerima bantuan lain, kehilangan pekerjaan, lansia tanpa penghasilan tetap, serta kondisi sosial ekonomi yang rentan.

Adapun daftar nama desa beserta jumlah yang mendapatkan bantuan langsung tunai di kecamatan kemuning kabupaten inhil sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Daftar penerimaan BLT kecamatan Kemuning 2021-2024**

| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk | Jumlah Penerima |
|---|---|---|---|
| 1 | Desa Keritang | 14.735 | 650 KPM |
| 2 | Desa Air Balui | 2.481 | 44 KPM |
| 3 | Desa Batu Ampar | 6.501 | 107 KPM |
| 4 | Desa Kemuning Muda | 2.097 | 76 KPM |
| 5 | Desa Kemuning Tua | 2.095 | 67 KPM |
| 6 | Desa Limau Manis | 1.314 | 30 KPM |
| 7 | Desa Lubuk Besar | 1.366 | 7 KPM |
| 8 | Desa Sekara | 3.279 | 85 KPM |
| 9 | Desa Sekayan | 3.379 | 17 KPM |
| 10 | Kelurahan Selensen | 4.683 | 29 KPM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Desa Talang Jangkang | 1.161 | 18 KPM |
| 12 | Desa Tuk Jimun | 893 | 37 KPM |
| Total | | 43.984 | 1.167 |

*Sumber: Data kecamatan kemuning 2024*

Dari 12 desa kecamatan kemuning terdapat 43.984 penduduk dan mayarakat yang menerima BLT sebanyak 1.167 kepala keluarga (KK) Penyaluran bantuan dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengawasan pihak kecamatan agar tepat sasaran dan transparan. Berdasarkan data diatas menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam program bantuan sosial. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan dan Kemendes PDTT tahun 2024–2025, pengalokasian Dana Desa untuk BLT dapat mencapai 10-15% dari total Dana Desa, dengan nilai bantuan sebesar Rp300.000 per bulan per KPM, sehingga membutuhkan sistem pertanggungjawaban yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan. meskipun jumlah dan waktu penyalurannya dapat disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan anggaran desa. Program BLT di Kecamatan Kemuning diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga daya beli, dan mendukung stabilitas ekonomi di tingkat lokal.

Meskipun BLT ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat desa. Di wilayah seperti Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, kondisi sosial ekonomi, rendahnya literasi kebijakan, serta mekanisme pemerintahan lokal turut menambah kompleksitas pelaksanaan BLT. Kurangnya transparansi dan komunikasi dengan masyarakat dapat menurunkan efektivitas program serta kepuasan penerima.

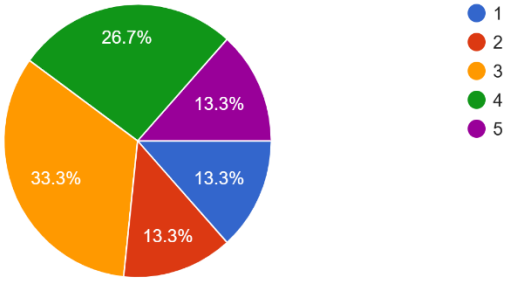
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BLT-DD belum sepenuhnya transparan, terutama dalam akses informasi dan publikasi data penerima. Studi lain menemukan bahwa ketidaktepatan sasaran dan distribusi BLT berdampak negatif terhadap kepuasan masyarakat. Namun, terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa BLT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan kontribusi sebesar 45,3%. Selain itu, tantangan seperti kurangnya monitoring dan ketidakpastian data penerima masih menjadi kendala dalam implementasi. Oleh karena itu, transparansi dan

akuntabilitas menjadi faktor penting agar program BLT berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal.

**Gambar 1.2**

**Hasil pra-kuesioner mengenai Transparansi pengelolaan anggaran BLT**

Apakah penentuan penerimaan BLT dilakukan secara terbuka dan diketahui Masyarakat?




*Sumber: Data Pra-Riset Google From 2025 (di olah peneliti)*

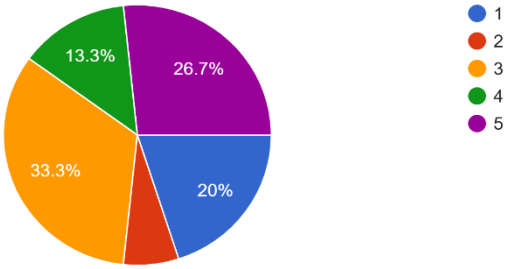
Dari hasil observasi dari survei 15 responden menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih beragam. Sebanyak 33,3% responden memberikan nilai 3 (netral), yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai keterbukaan penentuan penerima BLT berada pada posisi cukup atau belum sepenuhnya jelas. Selanjutnya, 26,7% responden memberikan nilai 4 (setuju), yang berarti sebagian masyarakat menilai proses tersebut sudah dilakukan secara terbuka. Namun demikian, masing-masing 13,3% responden memberikan nilai 1 (sangat tidak setuju), nilai 2 (tidak setuju), dan nilai 5 (sangat setuju).

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat responden yang menilai proses penentuan penerima BLT sudah transparan, masih ada sebagian masyarakat yang merasa kurang atau bahkan tidak setuju bahwa proses tersebut dilakukan secara terbuka. Dominasi jawaban netral mengindikasikan bahwa transparansi pengelolaan dan penentuan penerima BLT di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau belum sepenuhnya dipahami atau dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi fenomena awal yang penting untuk diteliti lebih lanjut, karena tingkat transparansi berpotensi memengaruhi kepuasan masyarakat kurang mampu sebagai penerima manfaat BLT.

**Gambar 1.3**

**Hasil pra-kuesioner mengenai kepuasan Masyarakat kurang mampu**

Apakah keterbukaan informasi BLT mempengaruhi tingkat kepuasan Anda terhadap pemerintah desa?




*Sumber: Data Pra-Riset Google From 2025 (di olah peneliti)*

Selanjutnya, diperoleh hasil dari 15 responden yang menunjukkan kecenderungan persepsi yang cukup positif. Sebanyak 33,3% responden memberikan nilai 3 (netral), yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada pada posisi ragu atau belum memiliki pendapat yang kuat. Selanjutnya, 26,7% responden memberikan nilai 5 (sangat setuju) dan 13,3% memberikan nilai 4 (setuju), sehingga secara keseluruhan 40% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa keterbukaan informasi BLT mempengaruhi tingkat kepuasan mereka terhadap pemerintah desa.

Sebagian responden (20% sangat tidak setuju dan 6,7% tidak setuju) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi BLT belum sepenuhnya memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa transparansi memang berperan dalam membentuk kepuasan, namun persepsinya belum merata. Terdapat kesenjangan antara tingkat transparansi pengelolaan dan penentuan penerima BLT dengan tingkat kepuasan masyarakat, di mana sebagian responden masih bersikap netral atau tidak setuju terkait keterbukaan, sementara sebagian lainnya mengakui adanya pengaruh positif transparansi terhadap kepuasan.Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan BLT karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meminimalkan penyimpangan, serta meningkatkan efektivitas program. Namun, sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek distribusi dan kesejahteraan, belum banyak yang mengkaji kepuasan penerima secara sistematis, khususnya di wilayah seperti Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Selain itu, keterbatasan data empiris dan dominasi pendekatan kualitatif membuat hasil penelitian sulit digeneralisasikan.Oleh karena itu, diperlukan penelitian kuantitatif dengan instrumen terukur untuk menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan anggaran BLT terhadap kepuasan masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris, melengkapi literatur akademik, serta menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah

daerah dan aparat desa dalam meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan efektivitas program BLT agar dampak sosial-ekonomi dapat lebih optimal

## B. Landasan Teori

### 1. Transparasi

Transparansi adalah keterbukaan dan kejelasan informasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks anggaran, transparansi berarti keterbukaan pemerintah mengenai fungsi, struktur, kebijakan fiskal, serta informasi keuangan kepada publik, termasuk dalam pelaksanaan program BLT. Transparansi memberikan berbagai manfaat, seperti mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta membantu evaluasi kebijakan pemerintah.Dalam pelayanan publik, transparansi berarti informasi disampaikan secara terbuka, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Hal ini mencakup kejelasan prosedur, persyaratan, biaya, waktu pelayanan, hingga pejabat yang bertanggung jawab. Transparansi juga didukung oleh aliran informasi yang bebas sehingga masyarakat dapat mengakses, memahami, dan mengawasi proses serta kinerja pemerintah.

Indikator transparansi meliputi ketersediaan informasi yang relevan dan berkala, proses pelaporan yang terbuka dan objektif, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, penyampaian laporan kepada publik, serta adanya sistem informasi publik. Selain itu, transparansi juga dapat diukur melalui kemudahan akses informasi, publikasi kegiatan dan laporan keuangan, laporan berkala dan tahunan, penggunaan media atau website, serta adanya pedoman penyebaran informasi.Dalam penelitian ini, indikator transparansi mencakup keterbukaan informasi yang mudah dipahami, publikasi laporan pengelolaan BLT, laporan berkala, kejelasan dan kelengkapan informasi, serta keterbukaan dokumen pengelolaan BLT. Adapun faktor yang mempengaruhi transparansi antara lain kebijakan, regulasi, program, serta keterbukaan anggaran dan kegiatan pemerintah kepada publik.

### 2. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang sering kita dengar, namun tidak selalu mudah untuk dipahami. Saat seseorang mendengar kata akuntabilitas, biasanya yang terbayang adalah sesuatu yang penting, tetapi belum tentu mengetahui cara untuk mewujudkannya. Dalam berbagai konteks, akuntabilitas kerap dianggap sama dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Padahal, kedua konsep tersebut memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas merujuk pada kewajiban untuk bertanggung jawab,

sedangkan akuntabilitas menekankan pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.

Akuntabilitas merupakan suatu konsep etika yang erat kaitannya dengan administrasi publik dalam pemerintahan, baik pada lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan beberapa konsep lain seperti tanggung jawab (responsibility), kemampuan untuk memberikan penjelasan (answerability), kemungkinan untuk dipersalahkan (blameworthiness), serta kewajiban hukum (liability), termasuk istilah lain yang memiliki hubungan dengan upaya menjelaskan dan mempertanggungjawabkan suatu tindakan.

Secara umum, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai tuntutan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas atau kewajiban yang telah diberikan. Dalam konteks audit laporan keuangan, auditor dituntut untuk bekerja dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi serta menjunjung profesionalisme. Hal ini bertujuan untuk memenuhi harapan klien yang menginginkan hasil kerja yang berkualitas tinggi.

2. Fungsi Fungsi Akuntabilitas

Terdapat lima fungsi utama akuntabilitas, yaitu:

a. memberikan jaminan melalui evaluasi dari pihak eksternal bahwa suatu organisasi dapat dinilai bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan.
b. menjaga agar prinsip dan praktik dalam pendidikan tinggi tidak mengalami kemunduran atau tergerus oleh perkembangan zaman.
c. memastikan bahwa program yang dijalankan telah terlaksana sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik
d. menyediakan informasi publik terkait mutu berbagai institusi dan program yang diselenggarakan.
e. memanfaatkan evaluasi kualitas sebagai sarana untuk mencapai kepatuhan atau pemenuhan standar tertentu.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, dapat dipahami bahwa akuntabilitas tidak hanya sebatas aktivitas formal, tetapi juga berperan

sebagai bentuk jaminan sekaligus media bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana suatu lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dalam pengelolaan keuangan atau pembiayaan pendidikan, prinsip akuntabilitas sangat penting, terutama terkait cara memperoleh dan menggunakan dana, baik untuk kepentingan internal organisasi maupun kepada publik Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan harus mampu menyusun laporan keuangan secara rinci dan transparan kepada pihak-pihak terkait, khususnya pengguna layanan pendidikan. Selain itu, menurut Halim dan Kusufi, akuntabilitas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal.

3. IndiKator Akuntabilitas

   Ada beberapa terdapat indikator dasar akuntabilitas, yaitu:

   a. Terdapat keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar prosedur yang telah ditetapkan.
   b. Diterapkannya sanksi terhadap kesalahan maupun kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
   c. Adanya hasil (output) dan dampak (outcome) yang dapat diukur secara jelas.

**3. Pengelolaan Anggaran**

mencapai tujuan dalam sebuah struktur organisasi ataupun struktur pemerintahan tentunya memerlukan suatu pengelolaan yang baik dan benar. Pengelolaan yang dimaksud disini adalah merupakan suatu tindakan yang berupaya menata setiap pelaksanaan tugas terutama tugas-tugas pokok menuju suatu keteraturan yang baik dan saling berhubungan. Dengan adanya pengelolaan yang baik diharapkan dapat merubah suatu keadaan hingga menjadi lebih dari keadaan sebelumnya, bahkan dapat menjadikan sesuatu menjadi baru sehingga memiliki nilai-nilai yang lebih baik dari keadaan semula.

Pengelolaan juga bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usahausaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang

telah ditetapkan.Sebenarnya mengenai pengelolaan (manajemen) merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seserang atau sekelompok orang atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut.

a. Pengertian Anggaran

Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang dinilai dengan uang. Pada umumnya anggaran dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan peningkatan penghasilan masyarakat dan nasional. Definisi dari anggaran banyak dikemukakan oleh para ahli manajemen, tetapi intinya adalah hampir sama, diantaranya adalah: suatu perencanaan keuangan dan operasional perusahaan yang menyeluruh dan mendetail tentang memperoleh dana menggunakannya secara efisien dan efektif dalam suatu periode tertentu.

Pada prinsipnya anggaran merupakan suatu rencana keuangan *(financial plan)* yang mencerminkan semua kegiatan operasional secara terperinci, sebagai petunjuk atau pengarahan dan sebagai dasar penilaian terhadap prestasi kerja yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

**4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer)* maupun tak bersyarat *(unconditional cash transfer)* untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa yang awal mula muncul dengan tujuan untuk mengurangi dampak pandemi COVID19.

a. Tujuan Bantuan Lansung Tunai

Tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, maka tujuan diberikannya BLT pun tidak lain adalah untuk menjaga, membantu dan melindungi masyarakat miskin di era pandemi Covid-19 sampai saat ini .

b. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)

Dasar hukum yang di gunakan untuk melaksanakan program bantuan langsung tunai adalan sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025,
2) Permenkeu No. 108 Tahun 2024 dan Permendes No. 2 Tahun 2024 yang mengatur alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran 2025, dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan ekstrem (BLT Dana Desa bisa mencapai 15% dari DD), pencegahan stunting, ketahanan pangan, serta dukungan program prioritas nasional lainnya, termasuk penguatan desa digital dan adaptasi perubahan iklim, di mana besaran tetap Rp300.000/bulan per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah salah satu bentuk bantuan tunai langsung (BLT) dalam skema ini.

c. Penyaluran Dan Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

1) Penanggung jawab penyaluran BLT-DD adalah Kepala Desa.
2) Penyaluran BLT-DD dapat dilakukan secara langsung Tunai (cash) kepada penerima manfaat oleh Pemerintah Desa.
3) Jangka waktu penyaluran BLT-DD dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020 hingga sekarang Desember 2025.
4) Penyaluran BLT-DD untuk Alokasi Bulan April selambat-lambatnya minggu pertama Bulan Mei 2020. Besaran BLT- Dana Desa perbulan ditetaapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga.

d. Dana Desa

Dalam Permenkeu No. 108 Tahun 2024,telah disebutkan bahwa Dana

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada peraturan di atas menjadi jelas bahwa dana desa berasal dari APBN yang di transfer melalui APBK dan di peruntukan bagi desa. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes tersebut tegas didefenisikan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa.

**5. Kepuasan Masyarakat Kurang Mampu**

Istilah kepuasan merupakan hal yang sangat umum dikenal. Setiap orang pada dasarnya pernah merasakan kepuasan ketika apa yang diperolehnya sesuai dengan harapan. Kepuasan sendiri merupakan bentuk respon positif dari individu. Memberikan kepuasan menjadi salah satu tujuan utama instansi pemerintah yang bergerak dalam penyediaan layanan jasa. Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan senang atau kecewa yang timbul akibat perbandingan antara hasil atau kinerja yang dirasakan dengan harapan yang dimiliki.Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana pelayanan dapat memenuhi harapan publik, diperlukan sebuah sudut pandang teoretis yang jelas.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip oleh Indriasih Dewi (2022), teori keagenan memandang hubungan kerja sama sebagai sebuah kontrak formal antara prinsipal dan agen. Sonbay (2022) menambahkan bahwa prinsipal merupakan pihak yang mempercayakan otoritas pembuatan keputusan kepada agen berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Penerapan teori ini dalam ranah publik berfungsi untuk menganalisis hubungan struktural antara pemerintah desa (agen) dan warga masyarakat (prinsipal). Kedudukan teori keagenan sebagai landasan utama (*grand theory*) menegaskan bahwa masyarakat selaku pemilik kedaulatan membutuhkan pemahaman yang utuh guna mengontrol dan menilai komitmen pemerintah desa dalam mengimplementasikan praktik *good governance* yang terbuka.

a. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah konsep dan fenomena bermatra multimensional. Kemiskinan pada luasnya didefenisikan berdasar dari segi ekonomi, khususnya pendapatan, berupa barang ditambah dengan keuntungankeuntungan non-material yang diterima oleh orang.Kemiskinan yaitu suatu kondisi yang ada di bawah nilai rendah kebutuhan minimum, baik untuk kehidupan dan lainnya, bisa disebut dalam garis kemiskinan (poverty Line) atau batas kemiskinan (Poverty Threshold).

Kemiskinan yaitu terjadi kekurangan hal-hal yang tidak bisa dipunyai orang, seperti makanan, pakaian, rumah, air minum dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan untuk hidup. Kemiskinan bisa berarti tidak akses pada pendidikan atau kerja yang bisa mengatasi masalah kemiskinan dan kehormatan yang layak bagi masyarakat, sekaligus juga memutuskan akses terhadap terpenuh hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, peluang kerja, rumah, air bersih, manfaat sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, perlindungan atas tanah, rasa nyaman, serta kesempatan masyarakat bisa berpartisipasi untuk program pembangunan. Demikian juga pemenuhan hak penduduk bermaksud erat kaitannya pada pengembangan suatu wilayah, dalam cepatnya pembangunan pedesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, mengembangkan kawasan pesisir serta lajunya pembangunan daerah tertinggal.

b. Ciri-Ciri Keluarga

Miskin Keluarga lazimnya digambarkan sebagai gejala kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan kelompok anggota masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu;

a. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan.
b. Posisi manusia dilingkungan sekitar.
c. Kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup secara manusiawi.

Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat dan sistem nilai yang dimiliki. Posisi manusia dalam lingkungan sosial bukan kebutuhan pokok yang menentukan, melainkan bagaimana posisi pendapatannya di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup manusiawi ditentukan oleh komposisi pangan apakah bergizi cukup dengan protein dan kalori, sesuai dengan tingkat

umur, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan alam yang dialaminya.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi. Dalam penelitian kuantitatif, dikehendaki bahwa penelitian dapat diandalkan dan valid. Jika sebuah penelitian dapat diandalkan, maka hasilnya dapat direplikasi. Jika suatu penelitian valid, maka kesimpulan yang dibuat dari penelitian itu benar.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data dalam bentuk angka yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kurang mampu di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yang menjadi penerima atau calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Populasi ini mencakup seluruh rumah tangga yang terdata sebagai keluarga miskin atau rentan miskin dalam data pemerintah desa maupun data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi dasar penyaluran BLT. Dalam metodologi penelitian kuantitatif, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini populasi bersifat besar dan tersebar di beberapa desa, pengambilan sampel dapat menggunakan Probability Sampling, khususnya Simple Random Sampling atau  Diambil dari 1.167 populasi dapat di lakukan perhitungan jumlah sampel dengan yang mana yaitu Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Lansung Tunai (BLT) Kecamatan Kemuning dnegan menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1+n(e)^2}$$

Dimana:

n: Jumlah sampel/Jumlah responden

N: Jumlah seluruh anggota populasi

e: Batas toleransi kesalahan pengambilan sampel 10% atau 0,1

$$n = \frac{N}{1 + n(e)^2}$$

$$n = \frac{1.167}{1 + 1.167(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.167}{12,67}$$

$$n = 92,10$$

$$n = 93$$

Dari hasil akhir perhitungan diatas, maka di ambil kesimpulan bahwa banyaknya sampel yang didapatkan berjumlah 93 responden.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian kuantitatif, penggunaan kuesioner adalah yang paling sering ditemui karena jika dibanding dengan alat pengumpul lainnya.

Penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa angket (kuesioner) yang akan diisi oleh responden. Angket yang dibuat berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup, yaitu jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti jadi responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan keinginannya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Kemuning merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Secara

geografis, Kecamatan Kemuning terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah sekitar 812,49 km². Wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi pada sisi utara, selatan, dan timur, sedangkan pada sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Posisi tersebut menjadikan Kecamatan Kemuning berada pada jalur penghubung antarprovinsi yang cukup strategis bagi mobilitas penduduk maupun distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.

Secara administratif, Kecamatan Kemuning terbagi menjadi 12 (dua belas) desa/kelurahan, yaitu 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan, meliputi Desa Keritang, Desa Air Balui, Desa Batu Ampar, Desa Kemuning Muda, Desa Kemuning Tua, Desa Limau Manis, Desa Lubuk Besar, Desa Sekara, Desa Sekayan, Kelurahan Selensen, Desa Talang Jangkang, dan Desa Tuk Jimun. Kedua belas wilayah tersebut selanjutnya terbagi lagi ke dalam puluhan Rukun Warga (RW) dan ratusan Rukun Tetangga (RT) sebagai satuan pemerintahan terkecil di tingkat masyarakat. Pemerintahan tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh Sekretaris Camat beserta beberapa Kepala Seksi, dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Kecamatan Kemuning didominasi oleh kawasan perkebunan, lahan pertanian, dan daerah aliran sungai yang berperan penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor perkebunan kelapa, kelapa sawit, serta berbagai komoditas pertanian lainnya menjadi tumpuan utama perekonomian masyarakat di hampir seluruh desa/kelurahan. Selain itu, keberadaan sungai dan jalur transportasi darat turut mendukung mobilitas penduduk serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan antardesa.

Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk di seluruh wilayah Kecamatan Kemuning pada tahun 2024 tercatat sebanyak 43.984 jiwa yang tersebar di 12 (dua belas) desa/kelurahan, dengan Desa Keritang sebagai wilayah yang berpenduduk paling banyak dan Desa Tuk Jimun sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit. Penduduk Kecamatan Kemuning berasal dari berbagai latar belakang etnis,

dengan mayoritas suku Melayu, disertai suku Jawa, Banjar, Minangkabau, Bugis, dan Batak, sebagaimana tercermin antara lain pada komposisi penduduk di Desa Kemuning Muda dan desa-desa di sekitarnya. Keberagaman etnis tersebut mencerminkan karakter masyarakat Kecamatan Kemuning yang heterogen namun tetap hidup berdampingan secara harmonis, dan menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

**Pembahasan Hasil Penelitian**

**1. Pengaruh Transparansi (X1) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y)**

Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel Transparansi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepuasan Masyarakat dalam pengelolaan anggaran Dana BLT, dengan nilai t hitung sebesar 2,513 dan tingkat signifikansi ( 0,014 < 0,05). Hubungan positif ini mengindikasikan bahwa semakin terbuka informasi mengenai pengelolaan Dana BLT kepada publik, maka tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu akan semakin meningkat.

Secara empiris, penerapan transparansi ini terbukti nyata di lapangan melalui upaya Pemerintah Desa Kemuning Muda yang mempublikasikan laporan realisasi anggaran dan infografis keuangan secara terbuka melalui situs web resmi desa. Keterbukaan akses digital ini memungkinkan masyarakat luas, khususnya penerima manfaat, untuk memantau langsung arus masuk dan keluar dana publik tanpa adanya hambatan birokrasi. Keberadaan transparansi berbasis digital ini bertindak sebagai jembatan informasi yang efektif dalam mengikis prasangka negatif serta membangun rasa aman di tengah masyarakat.

Temuan lapangan ini diperkuat oleh studi relevan dari Sari, Dasila, & Wahida (2022) yang menegaskan bahwa transparansi keuangan desa memberikan implikasi krusial serta kontribusi positif terhadap tingkat efektivitas dan keberhasilan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Melalui transparansi yang konsisten, kepercayaan publik dapat dirawat sehingga bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa.

**2. Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y)**

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepuasan Masyarakat, dengan perolehan nilai t hitung sebesar 5,240 dan signifikansi sebesar (0,003 < 0,05). Hal ini menandakan bahwa aspek pertanggungjawaban memengaruhi persepsi kepuasan masyarakat kurang mampu terkait program BLT.

Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas mencerminkan kesesuaian tindakan aparat pengelola dengan regulasi baku yang berlaku serta ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Ketika masyarakat melihat bahwa Dana BLT disalurkan secara jujur, objektif berdasarkan kriteria kemiskinan yang adil, serta disampaikan tepat waktu tanpa adanya potongan administrasi ilegal (pungutan liar), maka tingkat kepuasan kolektif akan mengalami penguatan. Akuntabilitas ini memberikan garansi moral sekaligus membuktikan bahwa aparatur desa bekerja secara profesional sesuai dengan amanat undang-undang publik.

Penelitian ini sejalan dengan kerangka konseptual Sutanto dan Hardiningsih (2021) yang menyatakan bahwa komitmen akuntabilitas dalam pengelolaan BLT Dana Desa merupakan instrumen vital dalam menjamin hak-hak masyarakat miskin tersampaikan dengan utuh. Ketika mekanisme pertanggungjawaban diimplementasikan dengan bersih, maka respon positif berupa kepuasan dan apresiasi dari masyarakat akan tercapai secara optimal.

**3. Pengaruh Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y)**

Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan melalui uji F, ditemukan bahwa variabel Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) secara bersama-sama memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat (Y) dalam pengelolaan anggaran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini dibuktikan melalui perolehan nilai F hitung sebesar 123,635 dengan angka signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi yang berada jauh di bawah ambang batas kritis (0,001 < 0,05) ini menegaskan bahwa model regresi yang diajukan dalam penelitian ini valid dan memiliki daya prediksi yang kuat. Selain itu, nilai

koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan bahwa sinergi kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi tingkat kepuasan masyarakat kurang mampu sebesar 73,3%, sedangkan sisanya sebesar 26,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pemodelan ini.

Secara teoretis, temuan empiris ini memberikan konfirmasi nyata terhadap relevansi Teori Keagenan (*Agency Theory*) pada sektor publik. Pemerintah desa, yang bertindak selaku agen (pelaksana), memegang mandat dan kepercayaan penuh dari masyarakat yang berkedudukan sebagai prinsipal (pemberi mandat) untuk mengalokasikan anggaran Dana BLT secara tepat guna. Ketika instansi pemerintah desa mampu mengintegrasikan keterbukaan informasi (transparansi) sekaligus menyajikan pertanggungjawaban kerja yang bersih (akuntabilitas), maka *asymmetric information* atau ketimpangan informasi antara aparatur desa dan warga dapat dipangkas secara signifikan. Berkurangnya celah informasi ini secara otomatis memicu rasa percaya (*trust*) yang mendalam, yang menjadi motor utama penggerak kepuasan masyarakat.

Hasil akhir dari analisis simultan ini didukung secara kokoh oleh penelitian terdahulu dari Harbama, Idris, & Syamsuddin (2024) yang menyimpulkan bahwa penguatan kolektif pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana merupakan pilar utama mutlak dalam mengoptimalkan indikator kepuasan masyarakat. Hal ini juga di perkuat oleh penelitian Garung dan Ga (2020) bahwa pada realitas tata kelola pemerintahan, kepuasan masyarakat tidak akan pernah tercapai secara optimal jika hanya bertumpu pada salah satu aspek saja. Keterbukaan informasi yang mengabaikan kejelasan tanggung jawab hanya akan memicu kebingungan publik, begitu pula pertanggungjawaban yang dilakukan secara tertutup tidak akan diakui kredibilitasnya oleh warga. Oleh karena itu, hubungan linear yang kuat ini membuktikan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas wajib berjalan selaras sebagai satu kesatuan sistem pelayanan publik yang prima.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap

Kepuasan Masyarakat dalam pengelolaan anggaran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kemuning, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat (Y) secara parsial. Hal ini dibuktikan melalui perolehan nilai t hitung sebesar 2,513 dengan tingkat signifikansi 0,014 (0,014 < 0,05). Hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin terbuka dan mudah diaksesnya informasi mengenai pengelolaan Dana BLT oleh publik, maka tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu akan semakin meningkat.
2. Akuntabilitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat (Y) secara parsial. Pernyataan ini didukung oleh perolehan nilai t hitung sebesar 5,240 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 (0,003 < 0,05). Hasil tersebut menandakan bahwa aspek pertanggungjawaban yang jelas dan tepat sasaran dalam program BLT menjadi faktor krusial yang mampu mendongkrak persepsi kepuasan masyarakat kurang mampu.
3. Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat (Y). Melalui pengujian uji F, ditemukan nilai F hitung sebesar 123,635 dengan angka signifikansi 0,001 (0,001 < 0,05). Angka yang berada jauh di bawah ambang batas kritis ini menegaskan bahwa model regresi yang diajukan dalam penelitian ini valid dan memiliki daya prediksi yang kuat. Selain itu, nilai koefisien determinasi ($R^2$ atau *R Square*) menunjukkan bahwa sinergi dari kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi tingkat kepuasan masyarakat sebesar 73,3%, sedangkan sisanya sebesar 26,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, antara Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepuasan Masyarakat dalam pengelolaan Dana BLT di Kecamatan Kemuning memberikan beberapa implikasi penting, antara lain:

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini berhasil mengonfirmasi bahwa Teori Keagenan tidak hanya berlaku pada sektor korporasi komersial, tetapi sangat relevan untuk membedah hubungan struktural di pemerintahan tingkat desa. Temuan ini membuktikan bahwa penyediaan informasi yang transparan dan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel oleh pemerintah desa (agen) merupakan instrumen utama yang efektif untuk memangkas asymmetric information (ketimpangan informasi) guna menciptakan kepuasan bagi masyarakat (prinsipal). Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur empiris dalam bidang manajemen keuangan daerah dan akuntansi sektor publik, khususnya yang berfokus pada evaluasi kebijakan jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah pedesaan.

2. Implikasi Praktis

Penggunaan situs web resmi desa sebagai media publikasi anggaran terbukti memberikan dampak psikologis yang positif berupa rasa aman dan puas di tengah masyarakat. Implikasi praktisnya, inovasi keterbukaan informasi berbasis digital seperti ini harus terus dipertahankan dan ditiru oleh desa-desa lain di wilayah sekitarnya sebagai standar pelayanan baku. Mengingat akuntabilitas merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kepuasan warga, hal ini memberikan implikasi bahwa masyarakat jauh lebih sensitif terhadap isu keadilan, ketepatan sasaran, dan kejujuran dalam pembagian dana. Oleh karena itu, kebersihan sistem penyaluran dari praktik pungutan liar atau manipulasi data kriteria kemiskinan harus menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh aparatur desa.

## Daftar Pustaka

### Buku

Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Graha Ilmu.

Andrianto, N. (2007). *Good e-government: Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Bayumedia Publishing.

Krina, L. L. (2003). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*.

Kristianten. (2006). *Transparansi anggaran pemerintah*. Rineka Cipta.

Poerwadarminta. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Raharjaputra. (n.d.). *Manajemen keuangan dan akuntansi*. Salemba Empat.

Soesana, A., et al. (2023). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.

Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS untuk penelitian*. Pustaka Baru Press.

Sukardi. (2007). *Metodologi penelitian pendidikan*. Bumi Aksara.

Sukardi. (2021). *Metodologi penelitian pendidikan: Kompetensi dan praktiknya* (Edisi revisi). Bumi Aksara.

Suparmoko. (n.d.). *Keuangan negara* (Edisi ke-5). BPFE.

**Artikel Jurnal**

Adrianti, A., Sumarlin, S., & Anwar, P. H. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di Kabupaten Gowa. *Income Journal*, 2(1), 33–44.

Akila, A. (2017). Pengaruh insentif dan pengawasan terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV. Vassel Palembang. *Jurnal Ecoment Global*, 2(2), 35–48.

Alfasadun, A., Hardiningsih, P., & Ratnasari, S. D. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Prosiding*.

Anis, S. F., Iriani, N. I., & Susanti, R. A. D. (2021). Analisis pengelolaan dana bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Landungsari. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(2).

Burhanuddin, et al. (n.d.). Transparency and effectiveness in managing the direct cash assistance for village funds (BLT-DD).

Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 89–102.

Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*.

Dapersal, P. S., Mustika, R., & Andriani, W. (2025). Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Accounting Information System, Taxes, and Auditing*, 4(2), 27–42.

Fitriani, A. S., et al. (2021). Analisis pengelolaan BLT dana desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*.

Handayani, E. J., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.

Harlik, H., Amir, A., & Hardiani. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2).

Harbama, S. W., Idris, M., & Syamsuddin, I. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat. *Access: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(3), 196–201.

Heri Sutanto dan Pancawati Hardiningsih, “Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19,” *InFestasi*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 1–10.

Indriasih Dewi, D. (2022). The role of commitment, competence, internal control system, transparency and accessibility in predicting the accountability of village fund management. The Indonesian Accounting Review, 12(1).

Istan, M. (2017). Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat menurut perspektif Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1).

Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis faktor kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*.

Kobat, A. M. (2023). Tata kelola pemerintah desa dalam pengelolaan BLT-DD. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1).

Kusumo, W. K., Achmad, T., & Zulaikha. (2022). Effectiveness of Internal Control 78 System as Early Detection Tool in Fraud Prevention of Village Fund

Management. Review of Economics and Finance, 20, 119–123. https://doi.org/10.55365/1923.X2022.20.12

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 30-34.

Nispa Sari, Rifqa Ayu Dasila, dan Altri Wahida, "Pengaruh Transparansi Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 45–56.

Putri, D. R., et al. (n.d.). Transparency and accountability of BLT-DD management during the COVID-19 pandemic in Indonesia.

Rafi'i, et al. (n.d.). Pengaruh bantuan langsung tunai terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sari, N., Dasila, R. A., & Wahida, A. (2022). Pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan BLT dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(2), 341–354.

Silvia, R. A., & Yuza, A. F. (2025). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin. *Jurnal Kajian Pemerintah*, 11(2), 38–51.

Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik terhadap pemberlakuan teori agensi dalam pengelolaan dana desa di suku Boti. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 6(2), 204–223.

Sri Wahyuni Harbama, Muhammad Idris, dan Indah Syamsuddin, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 12–25.

Sysnanda, et al. (n.d.). Evaluasi program bantuan langsung tunai bagi keluarga miskin.

Widnyani, et al. (n.d.). Quality of direct cash assistance services affected by COVID-19.

Yopi, I. A., Prihatiningsih, A., & Marlina, T. (2025). Pengelolaan BLT dana desa. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 9(1), 135–148.

**Website/Media Online**

Amrin, I. (2025, October 18). Penyaluran BLT Rp30 triliun akan dongkrak

pertumbuhan ekonomi hingga 5,7 persen. *InfoPublik*. https://infopublik.id

Arsika, M. P. (2025, October 20). BLT tambahan Rp900 ribu 2025: Jadwal cair hingga cara cek penerima. *Detik Sumbagsel*. https://www.detik.com

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, *Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2024* (Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2024).

Pemerintah Desa Kemuning Muda, “Keuangan Desa Kemuning Muda,” Portal Resmi Desa Kemuning Muda, https://www.kemuningmuda.desa.id/p/keuangan.html (diakses pada 20 Juni 2026).

Pemerintah Desa Kemuning Muda, "Potensi Desa Kemuning Muda", https://www.kemuningmuda.desa.id/, diakses 18 Juni 2026.

Raharjo, S. (2019, March 25). Makna koefisien determinasi (R square) dalam analisis regresi linear. *SPSS Indonesia*. https://www.spssindonesia.com

Wikanto, A., & Siswanto, D. (2025). Bansos BLT Rp900.000 akan cair untuk 35,04 juta orang. *Kontan*. https://nasional.kontan.co.id